

**PENGELOLAAN KESAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK;  
UPAYA MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DI DPR RI DALAM PENCAPAIAN  
MDGs 2015**

**Yanti Hermawati**  
*FISIP-Universitas Terbuka*

herma@ut.ac.id

*Masih banyak calon legislatif (caleg) perempuan yang belum berhasil dalam memperoleh dukungan suara signifikan pada pemilu legislatif tahun 2009. Selain itu, perempuan yang telah memperoleh kursi di DPR RI belum menunjukkan peran yang signifikan dan belum banyak menduduki posisi penting. Realitas tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan peran perempuan di DPR RI. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesan positif dari konstituen dan masyarakat bahwa perempuan memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam aktivitas politik. Kesan positif dapat diperoleh melalui pengelolaan kesan (impression management) yang efektif. Artinya, perempuan dapat melakukan komunikasi politik dengan baik sehingga harapan politiknya dapat terpenuhi. Pengelolaan kesan merupakan aktivitas seseorang untuk membentuk pandangan orang lain terhadap dirinya berdasarkan simbol-simbol yang ia tampilkan. Pengelolaan kesan layaknya desain peran dalam suatu pertunjukan teater, yaitu adanya panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan (front stage), merupakan tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau bergaya layaknya aktor yang berperan. Sedangkan panggung belakang (back stage), adalah tempat untuk mempersiapkan perannya di panggung depan. Melalui pengelolaan kesan yang baik, perempuan diharapkan dapat diakui dan dipercayai memiliki kemampuan berpolitik setara dengan laki-laki oleh masyarakat.*

Kata Kunci: Pengelolaan Kesan, Komunikasi Politik, Politik Perempuan, DPR RI

## **PENDAHULUAN**

*Millenium Development Goals (MDGs) berisi 8 tujuan dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015. Salah satu tujuannya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan ketiga MDGs ini, ditetapkan tiga indikator yaitu; 1) rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta Angka Melek Huruf perempuan dan laki-laki. 2) kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian/Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 3) proporsi keterwakilan perempuan di DPR-RI/legislatif daerah (Susiana, 2011).*

Dalam Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia 2010 (Alisjahbana, 2012) dijelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan ketiga MDGs terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik adalah; 1) sebagian besar perempuan

kurang memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. 2) Pendidikan politik yang sensitif gender, baik untuk calon anggota legislatif laki-laki maupun perempuan, sangat diperlukan. 3) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten di samping perempuan (pemilih dan calon legislatif) perlu terus diberi peluang untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia 2010 (Alisjahbana, 2012), dijelaskan pula beberapa kebijakan yang dibuat untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu; 1) meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. 2) Menyusun modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula dan lansia. 3) Meningkatkan pendidikan pemilih bagi calon legislatif perempuan. 4) Meningkatkan pendidikan politik bagi kader perempuan yang menjadi anggota partai politik.

Hasil laporan Bappenas tahun 2010 tentang pencapaian indikator MDGs di Indonesia mengacu pada berbagai hitungan statistik yang bagi beberapa pengamat, dianggap tidak mewakili ketercapaian MDGs di Indonesia. Misalnya Mirsiadi (2012), peneliti di Lembaga Studi Harmoni Indonesia yang merupakan alumnus *National University Filipina* ini menyangsikan ketercapaian MDGs di Indonesia. Mirsiadi (2012) misalnya, peneliti dari Lembaga Studi Harmoni Indonesia ini menyangsikan ketercapaian MDGs di Indonesia. Menurut Misriadi (2012), dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) bertajuk *Beyond Scarcity; Power, Poverty, and the Global Water Crisis*, posisi Indonesia semakin menurun. Misriadi (2012) pun menjelaskan bahwa kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia juga ditunjukkan dalam laporan regional pencapaian MDGs Asia Pacific oleh ADB-UNDP-UNESCAP yang menunjukkan bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina. Wahyu Susilo (2012), *Program Manager Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, *Observer Participant* di *Special Ministerial Meeting for Millennium Development Goal In Asia and The Pasific* menyatakan hal yang sama. Susilo (2012) menjelaskan bahwa salah satu titik lemah dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia adalah tidak adanya pengakuan inisiatif masyarakat, baik organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Menurut Susilo (2012), pemerintah selama ini tidak pernah mendorong rasa kepemilikan bersama terkait MDGs kepada seluruh masyarakat. Susilo (2012) pun menambahkan bahwa dalam empat kali laporan yang disusun oleh Pemerintah Indonesia, sangat kuat kesan bahwa pencapaian MDGs identik dengan pelaksanaan program pemerintah saja.

Dalam laporan Bappenas tahun 2010 tentang pencapaian indikator MDGs pada tujuan ketiga, menunjukkan bahwa proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR mengalami peningkatan dari 12,50% di tahun 1990 mencapai 17,90% di tahun 2009 (Alisjahbana, 2012). Namun pencapaian MGDs yang hanya mengacu pada angka statistik tersebut belum dianggap cukup mampu mencapai keterwakilan perempuan di DPR RI. Jika dilihat dari jumlah anggota DPR RI periode 2009-2014 ([dpr.go.id](http://dpr.go.id)) dapat diketahui bahwa prosentasi perempuan dan laki-laki berjarak cukup jauh, yaitu 17,68% perempuan dan 82,32% laki-laki. Selain itu, berbagai posisi penting di DPR RI ([dpr.go.id](http://dpr.go.id); per-13 Mei 2012), belum menempatkan perempuan pada posisi yang signifikan, misalnya dari lima orang pimpinan DPR RI tidak satu pun perempuan. Hanya ada satu perempuan yang menjadi ketua Komisi dari 11 Komisi yang ada di DPR RI, satu wakil ketua di badan legislasi, satu wakil ketua di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), dan satu wakil ketua di BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen).

Kondisi pertama menunjukkan bahwa masih banyak caleg perempuan yang belum berhasil dalam memperoleh dukungan suara signifikan pada pemilu legislatif tahun 2009. Sedangkan kondisi kedua menunjukkan bahwa anggota DPR RI perempuan belum banyak menduduki posisi penting di DPR RI. Realitas tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan peran perempuan di DPR RI. Hal ini pun menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah maupun perempuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perempuan di dunia politik agar keberadaan perempuan bukan hanya sekedar pelengkap atau sekedar pemenuhan kewajiban karena adanya suatu undang-undang.

Keberadaan perempuan di legislatif merupakan suatu kebutuhan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sensitif gender, yaitu memenuhi kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara berimbang. Hal ini tentu saja tidak mudah, perempuan memerlukan wawasan dan teknik komunikasi politik yang baik. Wawasan saja tidak cukup untuk mentransformasikan ide dan gagasan dalam area politik. Diperlukan adanya kemampuan lobi, negosiasi, dan pencitraan yang tepat. Apalagi Mac Donald (1999) menyatakan bahwa budaya patriarki yang tertanam dalam struktur dan budaya suatu masyarakat mampu mengakibatkan ketimpangan gender di dalam masyarakat tersebut. Dunia politik yang dalam budaya patriarki sering dianggap sebagai dunia laki-laki dapat menyebabkan perempuan dianggap tidak tepat jika berada pada dunia politik.

Dalam kondisi tersebut, perempuan mampu memanfaatkan strategi komunikasi dengan pendekatan dramaturgi. Pendekatan dramaturgi dapat digunakan untuk membangun citra perempuan di masyarakat. Perempuan dapat mengelola kesan positif dari masyarakat tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik.

Menghilangkan kesan bahwa perempuan bukan sekedar pemeran pendukung dalam aktivitas politik, tetapi perempuan pun mampu menjadi pemeran utama dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, diharapkan tertanam citra positif bagi perempuan yang beraktivitas di dunia politik.

**Tabel 1.**  
**Anggota DPR RI 1955-2004 Berdasarkan Jenis Kelamin**

Periode	Perempuan		Laki-Laki	
	Jumlah	Prosentase (%)	Jumlah	Prosentase (%)
1955-1956	17	6,3	272	93,7
Konstituante 1956-1959	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,8	460	92,2
1977-1982	29	6,3	460	93,7
1982-1987	39	8,5	460	91,5
1987-1992	65	13	500	87
1992-1997	62	12,5	500	87,5
1997-1999	54	10,8	500	89,2
1999-2004	46	9	500	91
2004-2009	61	11,09	489	88,9

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2001 dalam Soetjipto, Ani Widyani. 2005 "Politik Perempuan Bukan Gerhana". Jakarta:Kompas. hal. 239.

## **PERAN PEREMPUAN DI DPR RI**

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia 2010 (Alisjahbana, 2012) menjelaskan bahwa kemajuan yang dicapai terkait dengan pemberdayaan perempuan di bidang politik adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disusul dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon anggota legislatif.

Adanya undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menuntut partai politik untuk memunculkan peran perempuan. Kuota sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan harus dipenuhi oleh setiap partai yang ingin berpartisipasi dalam pemilu tahun 2009. Untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif, partai politik

memunculkan sosok perempuan dengan latar belakang yang beragam, mulai dari aktifis politik, selebritis hiburan, istri pengurus partai, anak pejabat, agamawan, ilmuwan dan lain sebagainya.

Fenomena ini mengundang banyak kritik dari masyarakat dan pengamat politik. Salah satunya adalah muncul pandangan bahwa tidak sedikit calon legislatif (caleg) perempuan yang cenderung dipaksakan dan kurang kompeten. Banyak kalangan menganggap bahwa rekrutmen caleg cenderung 'asal' sehingga melahirkan para perempuan yang cenderung dipaksakan untuk terjun dalam dunia politik. Tanpa kapasitas politik dan kemampuan politik yang memadai. Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (radarlampung.co.id) perempuan di parlemen yang berkiprah di dunia politik ternyata belum mampu menawarkan kultur politik yang berbeda. Perempuan belum mampu menunjukkan diri sebagai agen perubahan. Menurut Hatifah (radarlampung.co.id), perempuan yang lolos ke parlemen kurang teruji secara politik. Pasalnya, mekanisme perekrutan diwarnai aroma nepotisme, ditambah proses kaderisasi tidak berjalan. Nurul Arifin, Anggota Komisi II DPR (radarlampung.co.id), memberikan penilaian yang sama. Menurut Arifin (radarlampung.co.id), Perempuan di parlemen belum memperlihatkan kontribusi kebijakan yang signifikan. Kenaikan jumlah perempuan di DPR tidak berbanding lurus dengan kualitas. Peran perempuan dalam legislasi, pengawasan, dan budgeting belum maksimal. Ujung-ujungnya, produk parlemen belum mengakomodasi aspirasi serta kepentingan kaum perempuan.

Secara kuantitatif, hasil pemilu legislatif menunjukkan bahwa dari 30 persen keterwakilan perempuan sebagai caleg, tidak semua mampu menduduki kursi dewan di DPR RI. Alhasil, dari 560 orang anggota DPR RI periode 2009-2014 hanya terdapat 99 orang perempuan. Artinya proporsi kursi perempuan di DPR RI hanya 17,68% sedangkan laki-laki sebanyak 82,32%.

**Tabel 2.**

**Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan di DPR RI 2009-2014**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase (%)</b>
<b>Perempuan</b>	99 orang	17,68
<b>Laki-Laki</b>	461 orang	82,32

Sumber: Situs Resmi DPR RI <http://www.dpr.go.id>. diakses tanggal 13 mei 2012

Data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (2012) pun menunjukkan hal yang sama, yaitu jumlah perempuan yang memperoleh kursi di DPR RI tidak berimbang dengan jumlah laki-laki yang memperoleh kursi di DPR RI. Berikut ini rekapitulasi perolehan kursi partai politik dan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin anggota DPR RI periode 2009-2014:

**Tabel 3.**  
**Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dan Klasifikasi Berdasarkan Jenis**  
**Kelamin Anggota DPR RI Periode 2009-2014**

No. Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Kursi	Anggota	
			Perempuan	Laki-laki
1	Partai Hati Nurani Rakyat	17	3	14
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	26	5	21
8	Partai Keadilan Sejahtera	57	3	54
9	Partai Amanat Nasional	46	7	39
13	Partai Kebangkitan Bangsa	28	7	21
23	Partai Golongan Karya	106	18	88
24	Partai Persatuan Pembangunan	38	6	32
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	94	17	77
31	Partai Demokrat	148	35	113

Sumber: Komisi Pemilihan Umum. *Statistik Anggota DPR 2009-2014 Hasil Pemilu Legislatif Perbandingan Perempuan Dan Laki-Laki*. <http://mediacenter.kpu.go.id> diakses tanggal 23 Mei 2012

Sedangkan komposisi keterwakilan perempuan dalam pemimpin alat kelengkapan DPR RI Periode 2009-2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.**  
**Komposisi Keterwakilan Perempuan dalam Pemimpin Alat Kelengkapan**  
**DPR RI Periode 2009-2014**

No. Urut Partai	Nama Partai	Jatah Kursi Pimpinan (Proporsional)	Anggota	
			Perempuan	Laki-laki
1	Partai Hati Nurani Rakyat	2	-	2
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	-	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	9	-	9
9	Partai Amanat Nasional	5	1	4
13	Partai Kebangkitan Bangsa	3	2	1
23	Partai Golongan Karya	13	1	12
24	Partai Persatuan Pembangunan	4	-	4
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12	1	11
31	Partai Demokrat	18	2	16

Sumber: Centre for Electoral Reform (CETRO) dalam Argama, Rizky., dkk. 2011. *Berharap pada 560; Catatan Kinerja DPR 2009-2010*

## **PENGELOLAAN KESAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK**

Citra (*image*), dalam konteks komunikasi politik, bukan sekedar perwujudan secara alamiah, namun dapat dikelola. Salah satu kajian komunikasi yang menjelaskan mengenai pengelolaan kesan adalah pendekatan dramaturgi dari Erving Goffman. Pengelolaan kesan dalam komunikasi politik sangat erat kaitannya dengan pembentukan

citra (*image*) politik. Firmanzah (2008) menjelaskan bahwa *image* politik adalah kesan dan persepsi publik terhadap apa saja yang dilakukan oleh aktor politik. Sedangkan pengelolaan citra, atau biasa dikenal dengan pengelolaan kesan (*impression management*) merupakan aktivitas seseorang untuk membentuk pandangan orang lain terhadap dirinya berdasarkan simbol-simbol yang ia tampilkan. Baldoni, J. (2003). menjelaskan bahwa pengelolaan kesan juga merupakan aktivitas seseorang untuk terlihat baik bagi orang lain dan diri mereka sendiri.

Terkait dengan komunikasi politik, pengelolaan kesan di panggung politik bukan sekedar mahir dalam beretorika politik. Komunikasi politik pun bukan sekedar pembicaraan politik. Arianie dalam Mulyana dan Solatun (2007) menjelaskan bahwa selain pembicaraan politik, komunikasi politik terkait pula dengan penggunaan gambar, gerakan, isyarat, pakaian, dan berbagai bentuk perlambangan lainnya yang berlaku di panggung politik. Penggunaan berbagai simbol dalam aktivitas politik dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan oleh para aktor politik (politisi).

Politisi akan berupaya menampilkan simbol-simbol yang dianggap mampu melahirkan kesan positif tentang dirinya. Namun tidak semua politisi berhasil memperoleh kesan sesuai harapannya. Nimmo dalam Mulyana dan Solatun (2007) menjelaskan bahwa kebanyakan politisi mendapat kesulitan besar untuk bisa dikenal bahkan untuk mempunyai citra positif. Arianie dalam Mulyana dan Solatun (2007) menambahkan bahwa politisi juga sering melakukan berbagai upaya untuk memperoleh citra positif, namun kenyataannya justru yang mereka peroleh adalah citra negatif tentang dirinya.

Dalam proses pengelolaan kesan, pemaknaan politisi terhadap perannya di panggung politik pun merupakan sesuatu yang penting untuk dikaji. Setiap politisi akan memaknai perannya secara berbeda satu dengan yang lainnya. Bagi para politisi lama, artinya ia sudah terbiasa dan lama menjalani aktivitas di panggung politik, tentunya akan berbeda pemaknaannya dengan politisi yang pemula. Arianie dalam Mulyana dan Solatun (2007) menjelaskan bahwa politisi pemula berpotensi gamang dalam memaknai aktivitas barunya, apalagi bagi mereka yang muncul secara tiba-tiba sebagai selebritis politik.

Anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagai aktor politik, berlatar belakang yang beragam. Ada yang memang sudah terbiasa di dunia politik, dan tidak sedikit yang sebelumnya tidak berada dalam pusaran politik. Berdasarkan pekerjaan misalnya, anggota DPR RI periode 2009-2014 berlatar belakang yang bervariasi. *Centre for Electoral Reform* (CETRO) dalam Argama (2011) telah mengidentifikasi keragaman latar belakang tersebut yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.**  
**Latar Belakang Pekerjaan Anggota DPR RI Periode 2009-2014**

No.	Pekerjaan	Jumlah Anggota	Prosentase (%)
1.	Artis	13	2,32
2.	Anggota DPR	148	26,43
3.	Anggota DPD	5	0,89
4.	Anggota DPRD	36	6,43
5.	Akademisi (guru, dosen)	28	5,00
6.	Pengusaha	60	10,71
7.	Swasta	200	35,71
8.	PNS	6	1,07
9.	Pengacara	6	1,07
10.	Mantan menteri	4	0,71
11.	Mantan kepala daerah	15	2,68
12.	Lain-lain	39	6,98
<b>TOTAL</b>		<b>560</b>	<b>100</b>

Sumber: Centre for Electoral Reform (CETRO) dalam Argama, Rizky., dkk. 2011. *Berharap pada 560; Catatan Kinerja DPR 2009-2010*

Keragaman tersebut akan melahirkan aktivitas komunikasi politik yang beragam pula. Nimmo dalam Mulyana dan Solatun (2007) menjelaskan bahwa politisi (aktor politik) sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politisi itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politisi mencari pengaruh lewat komunikasi.

Konsep pengelolaan kesan (*impression management*) di perkenalkan Erving Goffman sebagai proses dramaturgi. Goffman dalam Mulyana dan Solatun (2007) menggunakan analogi drama dan teater, yaitu bagaimana individu tampil di dunia sosial. Goffman menyaksikan bahwa individu dapat menyajikan suatu pertunjukan (*show*) bagi orang lain, tetapi kesan (*impression*) yang diperoleh khalayak terhadap pertunjukan itu dapat berbeda-beda, ada yang memberikan kesan positif bisa juga ada yang memberikan kesan negatif.

Berdasarkan dramaturgi, Goffman (dalam Mulyana dan Solatun, 2007:40) membagi kehidupan sosial menjadi dua wilayah, yaitu;

1. Panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Panggung depan (*front stage*), merupakan tempat atau peristiwa sosial yang memungkinkan individu menampilkan peran formal atau bergaya layaknya aktor yang berperan. Menurut Sarwono (2006) di panggung depan ini, seorang aktor akan menunjukkan

perilaku-perilaku yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si aktor.

2. Panggung belakang (*back stage*), adalah tempat untuk mempersiapkan perannya di panggung depan. Dalam panggung belakang, seseorang atau tim dapat memperlihatkan berbagai macam perbedaan pendapat dalam proses perencanaan peran yang akan ditampilkan di panggung depan.

Goffman dalam Mulyana dan Solatun (2007) menjelaskan bahwa aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin. Konsep rutin, menurut Goffman, jarang dilakukan sendiri. Goffman menggunakan istilah tim (*team*) sebagai sejumlah individu yang bekerjasama mementaskan sesuatu yang dianggap rutin (*routine*).

Beberapa elemen dasar dari pertunjukkan tim ini dikemukakan oleh Goffman dalam Mulyana dan Solatun (2007) antara lain;

1. Saat suatu tim pertunjukkan sedang berjalan, sesuatu dapat mengganggu atau menyimpang dari setiap anggota tim pertunjukkan itu. Setiap peserta tim harus bergantung pada tindakan dan perilaku mitranya, sedangkan temannya harus bersikap demikian juga padanya.
2. Bila para anggota tim itu harus bekerja sama untuk mempertahankan suatu definisi atas situasi tertentu di hadapan penonton, para anggota tim akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesan tersebut. Oleh karena itu, para peserta tim, sesuai dengan frekuensi, mereka bertindak sebagai suatu tim serta sejumlah masalah yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan kesan, cenderung diarahkan oleh ketentuan yang dinamakan kebiasaan. Karena itu diperlukan langkah protektif, yaitu 'kebijaksanaan', agar individu yang bukan pemain rela menghindari daerah dimana mereka tidak diundang, yaitu panggung belakang.

Pada panggung depan, para pemain memiliki kesempatan untuk menciptakan *image* terhadap pertunjukkan yang skenarionya sudah diatur sedemikian rupa dan berbeda jauh dengan apa yang ada di wilayah belakang. Pada bagian lain, penampilan individu secara teratur berfungsi secara umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu. Hal ini dikenal dengan *setting* dan *personal front*. *Setting* dan *personal front* ini untuk kemudian dibagi lagi menjadi penampilan (*appearance*) dan gaya (*manner*).

Dalam konteks dramaturgi, *self* merupakan produk yang ditentukan oleh situasi sosial, paling tidak mirip dengan apa yang disebut skenario yang telah dipersiapkan oleh sutradara bagi para pemainnya di atas panggungnya sendiri. Karena itu menurut Goffman dalam Mulyana dan Solatun (2007), selama pertunjukkan berlangsung, tugas utama aktor adalah mengendalikan kesan yang disajikan selama pertunjukan. Perbedaan pendapat

diantara para anggota tim tidak hanya melumpuhkan kesatuan bertindak akan tetapi juga membuat kikuk realitas yang mereka wakili.

Pendekatan dramaturgi ini dapat digunakan untuk mendesain komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan. Desain ini diperlukan berdasarkan asumsi bahwa setiap perilaku politik dapat dikelola sehingga menghasilkan kesan yang diharapkan. Pada prakteknya, dalam aktivitas politik, seseorang tidak dapat bekerja sendiri. Dalam proses kampanye politik misalnya, biasanya dilakukan oleh tim kampanye yang dipimpin oleh *Manajer Campaign*. *Manajer Campaign* berperan layaknya sutradara yang mengatur lakon dari artis dalam panggung sandiwara. *Manajer Campaign*, melakukan berbagai strategi pengelolaan kesan yang dianggap tepat untuk meraih tujuan yang diharapkan.

Selain dalam aktivitas kampanye, pengelolaan kesan pun dapat dilakukan dalam aktivitas politik perempuan saat ia telah menjadi anggota DPR RI. Keberadaan Asisten Anggota (AA) dan Tenaga Ahli (TA) yang melekat dan difasilitasi oleh Negara untuk anggota DPR dapat dimanfaatkan sebagai tim dalam aktivitas pengelolaan kesan. Perempuan dapat memberdayakan tim ini untuk mengelola kesan dirinya sebagai aktor di panggung politik. Selain itu, adanya Kaukus Perempuan Parlemen RI yang merupakan gabungan para perempuan anggota DPR RI lintas partai, dapat dimanfaatkan pula untuk mengembangkan strategi dalam pengelolaan kesan bagi perempuan dalam dunia politik.

Terlepas dari kepentingan partai yang sangat kuat, perempuan memiliki tugas untuk mewujudkan citra positif mengenai keberadaan perempuan di panggung politik. Pencitraan ini diperlukan agar perempuan dinilai setara dengan laki-laki dalam setiap aksinya di panggung politik. *Setting* dan *personal front* yang ditampilkan oleh perempuan dalam dunia politik, perlu memperhatikan harapan-harapan konstituen dan masyarakat. Dengan kata lain, perempuan harus mampu membaca sosok politisi yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu, menciptakan kekaguman dan simpati dari konstituen dan masyarakat.

Karena itu, untuk memperoleh kesan yang diharapkan, perempuan harus mampu mengelola penampilan (*appearance*) dan gaya bertingkah laku (*manner*)-nya sesuai dengan sosok politisi yang diharapkan oleh masyarakat. Perencanaan inilah yang dapat dikelola oleh politisi perempuan pada panggung belakang sehingga aksinya di panggung depan mendapat kesan seperti yang ia harapkan.

Pengelolaan kesan memang bukan hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat dilakukan. Seperti halnya seorang aktor yang harus berperan di atas pentas, aksinya tentu tidak akan langsung sempurna. Ia perlu terus berlatih dan mengikuti pengarahan sutradara agar ia dapat tampil maksimal dan memperoleh kesan yang diharapkan. Oleh sebab itu, perempuan yang akan berperan di panggung politik perlu mempersiapkan diri untuk dapat beraksi dengan baik. Artinya, segala perilaku yang

diekspresikannya di panggung politik merupakan perilaku yang terencana, terlatih, dan tidak setengah-setengah.

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh perempuan adalah dengan membaca penampilan dan gaya bertingkah laku dari sosok politisi yang diharapkan masyarakat, sehingga proses pengelolaan kesan dalam bentuk *setting* dan *personal front* di panggung politik dapat dilakukan maksimal dan memperoleh citra yang diharapkan. Tidak ada lagi politisi perempuan di DPR RI yang terjerat tidak pidana korupsi, foto porno, perselingkuhan, pendiam dan tidak berani bersuara lantang dalam forum rapat. Tidak ada pula yang tidur atau membolos pada forum rapat, selalu mengunjungi konstituen pada waktunya, menyampaikan secara tegas amanat rakyat, dan lain sebagainya. Bahkan jika perlu, semua aktivitas positif yang dilakukan perempuan dalam dunia politik terpublikasikan, yaitu salah satunya dengan penggunaan media massa yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian peran perempuan dalam legislasi, pengawasan, dan budgeting dapat maksimal. sehingga produk yang dihasilkan dapat mengakomodasi aspirasi serta kepentingan kaum perempuan.

## **SIMPULAN**

Salah satu pendidikan politik yang perlu dipahami oleh perempuan adalah adanya proses dramaturgi atau pengelolaan kesan dalam setiap aksi yang diperankan oleh politisi. Setiap politisi memiliki panggung depan dan panggung belakang yang perlu dikelola dengan baik sehingga setiap aksinya di panggung politik mendapat kesan sesuai dengan harapannya, yaitu kesan positif.

Melalui pengelolaan kesan yang baik, perempuan diharapkan dapat diakui dan dipercayai memiliki kemampuan berpolitik setara dengan laki-laki oleh masyarakat. Dengan menciptakan kesan positif terhadap peran perempuan di dunia politik, pencapaian tujuan politik perempuan diharapkan akan lebih mudah dicapai. Keterwakilan perempuan bukan sekedar sebagai pemeran pendukung, namun perempuan pun dapat menjadi pemeran utama dan diperhitungkan dalam panggung politik DPR RI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Argama, Rizky, dkk. 2011. *Berharap pada 560; Catatan Kinerja DPR 2009-2010*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Baldoni, J. 2003. *Great communication secrets of great leaders*. McGraw-Hill
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Mac Donald, Mandy., Sprenger, Ellen dan Dubel. 1999. *Gender dan Perubahan Organisasi*. Yogyakarta: ISIST dan REMDEC
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi; Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Susiana, Sali. 2011. *Pencapaian Millenium Development Goals*. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Non Buku:**

- Komisi Pemilihan Umum. *Statistik Anggota DPR 2009-2014 Hasil Pemilu Legislatif Perbandingan Perempuan Dan Laki-Laki*. <http://mediacenter.kpu.go.id/data-olahan/789-statistik-anggota-dpr-2009-2014-hasil-pemilu-legislatif-perbandingan-perempuan-dan-laki-laki.html>. diakses tanggal 23 Mei 2012
- Alisjahbana, Armida S., dkk. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010*. <http://www.bappenas.go.id/node/118/2813/laporan-pencapaian-mdgs-indonesia-2010/>. Diakses tanggal 13 Mei 2012
- Misriadi, Target MDGs jauh dari harapan?  
<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=110964&lokasi=lokal>
- Radar Lampung. Perempuan Parlemen. <http://radarlampung.co.id/read/opini/tajuk/31679-perempuan-parlemen-> diakses tanggal 23 Mei 2012
- Situs Resmi DPR RI. Daftar Anggota- Berdasarkan Alat Kelengkapan. <http://www.dpr.go.id/id/anggota/per-alat-kelengkapan>. diakses tanggal 7 Juli 2012
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. "Politik Perempuan Bukan Gerhana". Jakarta:Kompas
- Wahyu Susilo, Wajah Muran MDGs di Indonesia.  
<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=98398&lokasi=lokal>